

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Retribusi Izin Trayek (Studi Angkutan Pedesaan)

Dheka Putra Agi Widjaya¹, Radjikan², Muhammad Roisul Basyar³

¹²³ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

dhekaputra11@gmail.com

radjikan@untag-sby.ac.id

roisulbasyar@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan yang mengatur angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diambil dari jurnal, buku, dan referensi lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn memuat enam indikator yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesenjangan, Daya Tanggap, dan Ketepatan. Hasil penelitian ini membahas enam indikator dalam konteks evaluasi kebijakan mengenai penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: Evaluasi; Angkutan; Kebijakan

A B S T R A C T

This study focuses on the evaluation of policies governing public transportation in Sidoarjo Regency. The purpose of this study is to measure the extent to which policies governing the implementation of public transportation in Sidoarjo Regency. This study uses a descriptive qualitative method with primary and secondary data collection. Primary data is obtained from observation, interviews, and documentation. While secondary data is taken from journals, books, and other relevant references. This study uses the theory of policy evaluation according to William N. Dunn. The theory of policy evaluation according to William N. Dunn contains six indicators, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. The results of this study discuss six indicators in the context of policy evaluation regarding the implementation of public transportation in Sidoarjo Regency.

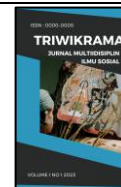
Keywords: Evaluation; Transport; Policy

1. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan proses perpindahan barang atau manusia dari suatu tempat dengan bantuan kendaraan bermotor. Menurut Salim (2000) dalam (Sugianto, 2020), transportasi merupakan kegiatan dari perpindahan barang dan/atau penumpang dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Keberadaan transportasi di Indonesia memiliki manfaat yang penting, salah satunya membantu dan memudahkan aktivitas manusia sehari-hari, serta menunjang pembangunan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah pedesaan. Dengan manfaat yang dimiliki oleh transportasi nasional, Indonesia memiliki peran untuk mengembangkan potensi dari transportasi

*Corresponding author

E-mail addresses: dhekaputra11@gmail.com



nasional dan mewujudkan transportasi umum yang dapat memastikan pergerakan manusia dan/ atau barang dengan aman, cepat, murah, dan nyaman terutama pada sektor transportasi angkutan umum (Kemenhub RI, 2017).

Angkutan umum merupakan sarana transportasi kendaraan bermotor di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi masyarakat umum. Menurut Warpani (1990) dalam (Wakari et al., 2019), angkutan umum merupakan angkutan orang dengan sistem sewa. Tujuan dari menyelenggarakan angkutan umum orang yaitu untuk menyelenggarakan layanan angkutan orang dengan baik dan layak bagi masyarakat pengguna angkutan umum. Bentuk layanan angkutan umum yang baik untuk masyarakat yaitu terselenggaranya layanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan teratur. Dalam menentukan pilihan dari jenis angkutan orang, setiap orang akan mempertimbangkan dalam berbagai faktor seperti tujuan perjalanan, jarak dan waktu tempuh, biaya, dan tingkat keamanan serta kenyamanan.

Indonesia memiliki 2 jenis layanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, yaitu angkutan tidak dalam trayek dan dalam trayek. Angkutan orang umum yang tidak dalam trayek diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, sedangkan Angkutan umum dalam trayek di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Penyelenggaraan angkutan umum di Indonesia memerlukan izin dari pemerintah daerah yang bersangkutan untuk memperoleh izin usaha dan izin trayek. Persyaratan untuk penyelenggaraan angkutan orang diatur dalam kebijakan yang telah ditetapkan di masing - masing kota. Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dan dinilai dapat mengurangi angka kemacetan. Kemacetan terjadi karena terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada setiap tahunnya sehingga jumlah kendaraan telah melampaui batas kapasitas jalan. Kemacetan di Indonesia sering terjadi pada kota besar maupun kota kecil atau kabupaten.

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2024) menunjukkan bahwa jumlah dari kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kendaraan bermotor sebanyak 22,001,528 kendaraan. Tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor meningkat di angka 22,774,562 dan meningkat di angka 23,605,425 pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan hingga mencapai angka 24,023,666 kendaraan bermotor. Dengan tingginya angka dari jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur, maka Provinsi Jawa Timur sering mengalami kemacetan di setiap ruas jalan kota/ kabupaten-nya.

Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten yang sering mengalami kemacetan, dikarenakan kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah suburban yang menjadikan kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah kendaraan bermotor tertinggi di Jawa Timur setelah Kota Surabaya dan Kabupaten Malang (Baidhowi, 2019). Kabupaten Sidoarjo memiliki wilayah seluas 714,24km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.996,825 berdasarkan data per tahun 2023.

Kebijakan tentang angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Retribusi Izin Trayek, menjelaskan bahwa angkutan merupakan proses perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan bantuan kendaraan bermotor; Kendaraan bermotor umum yaitu kendaraan yang digunakan sebagai angkutan orang dan/ atau barang dengan dipungut biaya jasa; Trayek merupakan lintasan dari angkutan umum dalam



layanan jasa angkutan umum orang dengan kendaraan bermotor yang memiliki tujuan, lintasan, dan jadwal yang tetap; Izin Trayek yaitu pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau badan hukum lainnya yang akan menyelenggarakan layanan angkutan umum orang (JDIH Kabupaten Sidoarjo, 2011).

Kebijakan tentang angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Retribusi Izin Trayek, menjelaskan bahwa angkutan merupakan proses perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan bantuan kendaraan bermotor; Kendaraan bermotor umum yaitu kendaraan yang digunakan sebagai angkutan orang dan/ atau barang dengan dipungut biaya jasa; Trayek merupakan lintasan dari angkutan umum dalam layanan jasa angkutan umum orang dengan kendaraan bermotor yang memiliki tujuan, lintasan, dan jadwal yang tetap; Izin Trayek yaitu pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau badan hukum lainnya yang akan menyelenggarakan layanan angkutan umum orang (JDIH Kabupaten Sidoarjo, 2011).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Retribusi Izin Trayek, tujuan dari dibentuknya peraturan ini yaitu untuk mengatur penyelenggaraan angkutan umum orang dengan kendaraan bermotor agar terciptanya tertib penyelenggaraan angkutan umum sehingga dapat terselenggaranya angkutan umum yang aman, nyaman, dan tertib.

Berdasarkan data dari (Dishub Pemerintah Sidoarjo Kota, 2024), Kabupaten Sidoarjo memiliki angkutan umum dengan total 57 trayek yang terdiri dari 1.364 armada dalam trayek, namun per 1 Januari 2024 hanya tersisa 29 dari 1.364 armada yang memiliki izin trayek dan masih beroperasi. Hal ini dikarenakan hanya 5 dari 57 trayek yang memperpanjang izin trayeknya. Penurunan jumlah angkutan umum dalam trayek di Kabupaten Sidoarjo disebabkan prosedur izin trayek tidak terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang berlaku dan terdapat faktor persaingan angkutan umum tidak dalam trayek yang mudah diakses dengan smartphone seperti taksi online dan ojek online. Menurunnya jumlah angkutan umum dalam trayek di Kabupaten Sidoarjo juga disebabkan oleh kualitas dari fasilitas dan/atau layanan angkutan umum yang semakin menurun seperti kondisi kendaraan yang kurang nyaman dan waktu tunggu yang lama sehingga terjadi penurunan minat masyarakat dalam menggunakan fasilitas angkutan umum dalam trayek.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada angkutan umum dalam trayek yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo, dapat diartikan bahwa penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak berjalan dengan baik. Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab dari menurunnya jumlah angkutan umum dan mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Retribusi Izin Trayek dengan studi angkutan pedesaan. Pada kesempatan kali ini peneliti memfokuskan pembahasan pada variabel design kelembagaan sehingga peneliti mengangkat judul ***“Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dan Retribusi Izin Trayek (Studi Angkutan Perdesaan)”***.



TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu rencana tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik ini dapat berupa regulasi, program, atau tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik melibatkan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

William N. Dunn berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu daftar tindakan yang saling berhubungan, yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan juga pembangunan perkotaan.

Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Abdul Basir (1996) Evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang deskriptif, informatif, prediktif, dilaksanakan dengan secara sistematis serta juga bertahap untuk menentukan kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki pendidikan. (Pangemanan, 2022). Menurut William N Dunn istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. (Wahyuni & Ap, 1988)

Evaluasi kebijakan sangat diperlukan untuk melihat kinerja dari kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh Samodra Wibawa (1994), bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu sebagai berikut: (Akbar, 2018)

1) Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2) Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3) Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4) Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Jenis jenis pendekatan evaluasi terhadap suatu kebijakan diungkapkan oleh William Dunn adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi semu (*pseudo evaluation*)

Evaluasi semu adalah evaluasi dengan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya terkait output kebijakan dengan tidak memperhatikan tujuan dari hasil

tersebut terhadap keseluruhan masyarakat atau individu karena berasumsi bahwa nilai mengenai tujuan atau hasil adalah sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self-evident*).

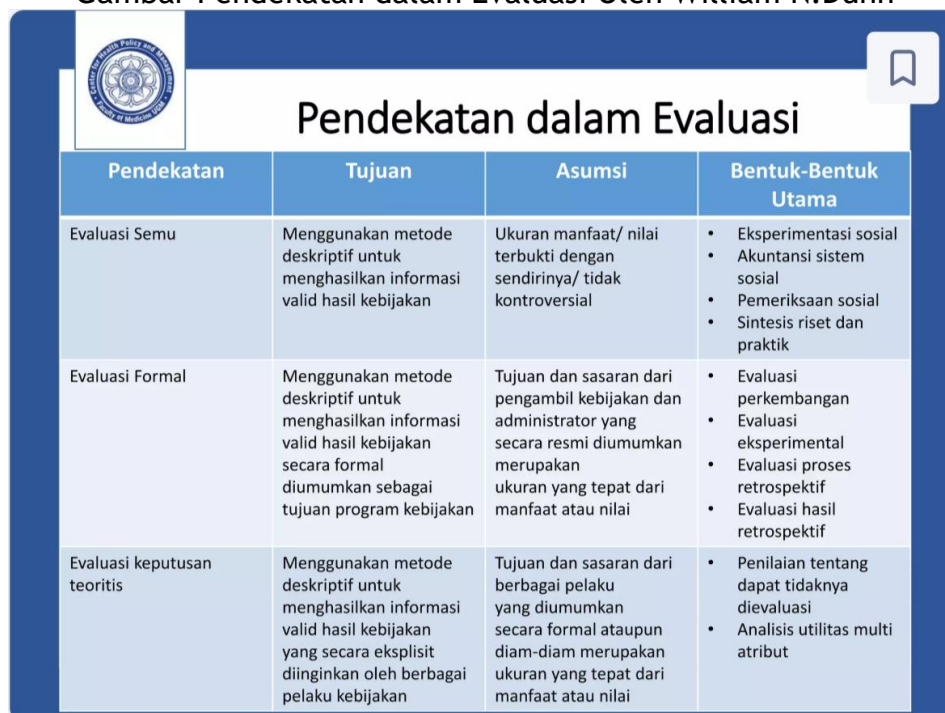
2) Evaluasi formal (*formal evaluation*)

Evaluasi formal adalah evaluasi dengan metode deskriptif untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya guna mengevaluasi output kebijakan berdasarkan tujuan yang telah dipublikasikan secara formal oleh pembuat kebijakan seperti dokumen undang-undang. Asumsi dari evaluasi formal bahwa tujuan merupakan ukuran yang sesuai untuk menilai suatu kebijakan.

3) Evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*)

Evaluasi keputusan teoritis adalah evaluasi dengan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dengan berusaha menunjukkan eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan yang terselubung atau dimunculkan.

Gambar Pendekatan dalam Evaluasi Oleh William N.Dunn



Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-Bentuk Utama
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid hasil kebijakan	Ukuran manfaat/ nilai terbukti dengan sendirinya/ tidak kontroversial	- Eksperimentasi sosial - Akuntansi sistem sosial - Pemeriksaan sosial - Sintesis riset dan praktik
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	- Evaluasi perkembangan - Evaluasi eksperimental - Evaluasi proses retrospektif - Evaluasi hasil retrospektif
Evaluasi keputusan teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	- Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi - Analisis utilitas multi atribut

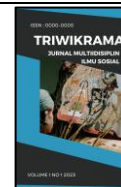
Sumber : (unitpublikasi, 2018)

2. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan & Biklen, s (1992:21) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku seseorang yang diamati. Jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang parsipipan. Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang didasari oleh filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Posisi peneliti sebagai instrument kunci, kemudian teknik

*Corresponding author

E-mail addresses: dhekaputra11@gmail.com



pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna daripada generalisasi.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan perkataan dan tindakan manusia sebagai sumber data utama yang dilengkapi dan didukung data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum, penelitian mempunyai dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang dimaksudkan untuk menjawab fenomena penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui observasi langsung yang dilakukan peneliti di objek penelitian atau tempat penelitian dan wawancara dengan informan terkait. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau bukan dari sumber pertama. Data sekunder dapat diambil dari dokumen-dokumen, buku literatur, jurnal, internet, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk mendukung data primer dalam pelaksanaan proses analisa.

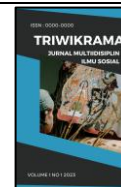
Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dapat berupa informasi atau fakta yang sesuai dengan topik untuk mendukung penelitian. Sugiyono (2013) mengungkapkan bahwa teknik pengumpulan data sebagai langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data. Terdapat 3 teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian dengan menggunakan beberapa teknik seperti, observasi, wawancara, dan diskusi terfokus. Adapun beberapa instrumen yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Secara umum, observasi merupakan pengumpulan data kualitatif menggunakan beberapa teknik seperti, wawancara dan observasi. Kemudian peneliti melakukan wawancara yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan penelitian melalui proses tanya jawab. Kemudian peneliti menggunakan dokumentasi agar data lebih relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi jika didukung oleh dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis Data

Analisis data merupakan teknik yang dilakukan peneliti untuk mengelola data menjadi sebuah informasi, data yang dimaksud dapat berupa observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Menurut John Turkey, teknik analisis data penelitian merupakan prosedur dalam menganalisis data. Prosedur analisis mencakup teknik menafsirkan data yang telah dianalisa dan merencanakan teknik pengumpulan data sehingga analisis menjadi lebih efisien.

Menurut Spradley, analisis data penelitian merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan dengan keseluruhannya. Tujuan teknik analisis data yaitu untuk menentukan simpulan secara menyeluruh yang berasal dari data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Teknik analisis data juga bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai data penelitian sehingga mudah dipahami oleh orang lain.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Mengenai Angkutan Umum di Kabupaten Sidoarjo

1. Efektivitas

Indikator pertama dalam evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yaitu efektivitas. Dalam indikator ini, dapat diketahui tingkat efektivitas dari kebijakan yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan penelitian, kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 2 Tahun 2011 cukup efektif dalam mengatur angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo. Efektivitas dari kebijakan yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo ini membuktikan bahwa kebijakan yang mengatur angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai indikator efektivitas sebagai salah satu indikator evaluasi kebijakan dari William N. Dunn.

Tercapainya indikator efektivitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2011 yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo ini dibuktikan dengan beberapa hasil wawancara dengan informan penelitian yang berpendapat bahwa penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo telah terselenggara dengan aman dan nyaman sebagai tujuan dari kebijakan yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan indikator evaluasi kebijakan kedua dari William N. Dunn. Dengan indikator ini dapat mengetahui tingkat efisiensi dari kebijakan yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kebijakan yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo kurang efisien dalam mengatur penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo.

Kurangnya efisiensi pada kebijakan yang mengatur angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo ini dibuktikan dengan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah Sidoarjo pada pemilik usaha angkutan umum dalam mengakses aplikasi/ *website OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)* yang dapat memudahkan para pemilik usaha angkutan umum dalam mengurus perizinan dan/atau perpanjangan izin trayek.

3. Kecukupan

Kecukupan merupakan salah satu indikator evaluasi kebijakan dari William N. Dunn. Dengan indikator kecukupan, dapat diketahui seberapa jauh capaian tujuan dari kebijakan yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan penelitian, dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 2 Tahun 2011 yang mengatur angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo belum mencukupi kebutuhan masyarakat mengenai fasilitas angkutan umum.

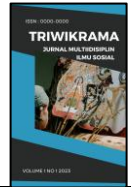
Kurangnya kecukupan sebagai indikator evaluasi kebijakan dari William N. Dunn dibuktikan dengan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan informan penelitian yang berpendapat bahwa tingkat keamanan dan kenyamanan dari angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo masih sangat rendah. Rendahnya tingkat keamanan dan kenyamanan dari angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo disebabkan karena masih terdapat kendaraan lama yang masih beroperasi.

4. Kesetaraan

Kesetaraan merupakan indikator evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang membahas mengenai meratanya pendistribusian kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan

*Corresponding author

E-mail addresses: dhekaputra11@gmail.com



informan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Perda Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2011 yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo cukup dalam mencapai indikator kesetaraan.

Tercapainya indikator kesetaraan dari Perda Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2011 yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo ini dibuktikan dengan adanya pengimplementasian kebijakan tentang angkutan umum dengan semua jenis angkutan umum yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

5. Daya Tanggap

Daya tanggap merupakan salah satu indikator evaluasi kebijakan dari William N. Dunn. Daya tanggap merupakan respon masyarakat dari adanya suatu kebijakan yang diberlakukan. Dengan indikator Daya Tanggap, dapat diketahui respon masyarakat dengan adanya penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merespon baik terhadap adanya penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo.

Tercapainya indikator Daya Tanggap sebagai indikator evaluasi kebijakan dibuktikan dengan respon masyarakat dari adanya kebijakan yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo, masyarakat menilai dengan adanya angkutan umum ini sangat membantu mereka dalam beraktivitas diluar.

6. Ketepatan

Ketepatan merupakan indikator evaluasi kebijakan dari William N. Dunn. Indikator ketepatan merupakan indikator yang membahas mengenai nilai dari suatu tujuan kebijakan. Dalam indikator ketepatan, kebijakan ini cukup tepat dalam mengatur angkutan umum yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo.

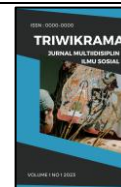
Tepatnya kebijakan dari Perda Kabupaten Sidoarjo No 2 Tahun 2011 yang mengatur angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo ini dibuktikan dengan beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti yang mengatakan bahwa tercapainya tujuan dari kebijakan ini berpengaruh terhadap pandangan masyarakat mengenai penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai evaluasi kebijakan tentang penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo, terdapat beberapa indikator dari teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang tercapai. Indikator evaluasi kebijakan yang telah tercapai dengan baik yaitu Indikator Daya Tanggap, tercapainya indikator ini dibuktikan dengan respon masyarakat yang menilai bahwa dengan adanya angkutan umum ini sangat membantu mereka dalam beraktivitas diluar.

Indikator dengan tingkat capaian cukup yaitu Efektivitas, efektivitas dari kebijakan ini dibuktikan dengan temuan peneliti dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo telah terselenggara dengan aman dan nyaman sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang mengatur angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo; Kesetaraan, kesetaraan dari kebijakan yang mengatur angkutan umum ini dibuktikan dengan adil dan meratanya implementasi kebijakan terhadap seluruh angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo; dan Ketepatan, tercapainya indikator ini dikarenakan adanya pengaruh dari tercapainya tujuan kebijakan yang berpengaruh pada pandangan masyarakat mengenai angkutan umum di Kab Sidoarjo.



Sementara itu terdapat indikator yang tidak tercapai yaitu indikator Efisiensi, kurangnya efisiensi dari kebijakan yang mengatur angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo dibuktikan dengan adanya pemilik angkutan umum yang kesusahan dalam mengurus perizinan usaha dan/ atau izin trayek melalui OSS RBA (*Online System Submission Risk Based Approach*); dan kurangnya indikator kecukupan ini dibuktikan dengan masih rendahnya tingkat keamanan dan kenyamanan dari fasilitas angkutan umum.

Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dari kebijakan yang mengatur angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan tercapainya tingkat efektivitas, kesetaraan, daya tanggap, dan ketepatan dari kebijakan. Faktor penghambat dari kebijakan ini yaitu tidak tercapainya efisiensi dan kecukupan dari kebijakan yang mengatur angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo.

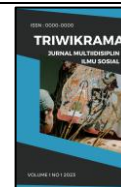
Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan mengenai angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo dengan studi angkutan pedesaan, terdapat rekomendasi dan saran dari peneliti yang dapat digunakan agar dapat terselenggaranya angkutan umum yang aman, nyaman, dan tertib di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai perizinan atau perpanjangan izin trayek melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah pemilik angkutan umum dalam melakukan kepengurusan izin usaha dan izin trayek.
2. Meningkatkan standar uji KIR pada angkutan agar angkutan umum di Kabupaten Sidoarjo dapat terselenggara dengan aman dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Baidhowi, A. (2019). Analisis Kemacetan Di Ruas Jalan Raya Aloha Sidoarjo. *Jurnal Swara Bhumi*, 1(3), 1-7.
- BPS Jawa Timur. (2024). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Timur (unit), 2020-2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Dessy Arif Setiawan, Dr. Ir. Nusa Sebayang, M., & Ir. Eding Iskak Imananto, M. (2019). Evaluasi Kinerja Dan Jumlah Armada Angkutan Umum Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Jalur Angkutan Trayek Lawang - Arjosari). *Jurnal Sondir*, 2, 1-5.
- Dishub Pemerintah Sidoarjo Kota. (2024). UTE PERJALANAN ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO. <http://opendata.sidoarjokab.go.id/hr/dataset/rasio-konektivitas-kabupaten-kota>
- Kemhub RI. (2017). Transportasi Sebagai Pendukung Sasaran Pembangunan Nasional. Dephub.Go.Id. <https://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional#>
- Kementerian Perhubungan. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. 4.



- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. PM 15 Tahun 2019, 13.
- Larasati, D., Kismartini, K., & Suwitri, S. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 13(0), 1-23.
- Ningrum, S. W., Muchsin, S., & Widodo, R. P. (2019). Evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Dalam Bidang Transportasi Umum Perkotaan (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Respon Publik*, 13(2), 53-61.
- Permenhub RI. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 13.
- Prakoso, F. A. (2020). EVALUASI KINERJA PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN TEGAL (Studi Kasus Angkutan Pedesaan Trayek Slawi - Larangan). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Primasworo, R. A., Pandulu, G. D., & Gons, Y. D. (2021). Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Trayek Malang - Kediri Berdasarkan Kepuasan Pelayanan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknik Sipil*, 15, 41-50. <http://jurnal.mdp.ac.id>
- Putri, F. A., & Indah Prabawati, S. Sos, M. S. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Suroboyo Bus Di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. *Publika*, 3. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/35604/31665>
- Rochmawan, R. A., Widodo, D., & Radjikan. (2024). EVALUASI KEBIJAKAN ANGKUTAN WIRAWIRI SUROBOYO SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PERKEMBANGAN ANGKUTAN UMUM BERBASIS TEKNOLOGI DI KOTA SURABAYA JAWA TIMUR. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 04(1), 37-48.
- Sugianto, & Kurniawan, M. A. (2020). Tingkat Ketertarikan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi Dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi. *Jurnal.Poltradabali.Ac.Id*, 1.
- Sugianto, M. A. K. (2020). Tingkat Ketertarikan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi Dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi. 1(2), 51-58.
- Wakari, V. V., Rogi, O. H. A., & Makarau, V. H. (2019). Daya Dukung Layanan Angkot Berdasarkan Jarak Jangkauan Masyarakat Terhadap Jalur Trayek Di Kota Manado. *Jurnal Spasial*, 6(3), 554-560.
- Zulfikar, W., & Prayoga, I. A. (2023). EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN PADA PELAYANAN ANGKUTAN UMUM PENUMPANG DI KOTA CIMAHI. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 3(2), 24-29. <https://doi.org/10.30743/jekkp.v4i2.6423>